

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H. R., dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Ahmad, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Dahana, Thomas Nanda. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.
- Dalimunthe, Nikmah. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Dalimunthe, Nikmah. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Ferricha, Dian. *Hukum Ketenagakerjaan di Era Digitalisasi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Flambonita, Suci. *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023.
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan*. Malang: Setara Press Malang, 2016.

- Malianawati, Dilli. *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. Pati: Eternity Publishing, 2021.
- Moniaga, Fenny, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Narachmad, Much. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, & Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. Jakarta: VisiMedia, 2009.
- Perdana, Surya. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Umsu Press, 2023.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, dan Farid Wajdi. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: AhliMedia, 2022.
- Rahayu, Devi. *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rahmatsyah. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sadi Is, Muhamad, dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Teguh, Harrys Pratama. *Kong Kali Kong Penegakan Hukum Perburuhan di Indonesia & Penyelesaiannya*. Indonesia: Pohon Cahaya, 2024.
- Tojiri, Yusuf. dkk. *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023.
- Wardhani, Novea Elysa, Sepriano Sepriano, dan Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

JURNAL

- Agung Nababan et al. "Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2022.
- Darma, S. A. "Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 2017.
- Darwati dan Aziz Budiarto. "Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan PHI No. 46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST)". *Lex Publica, Volume IV, Nomor 1*, November 2017.
- Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, F. A., & Seruni, P. M. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2), 2022.
- Fitriani, R. A., Satria, R., Astono, A., Sitorus, A. P. M. C., & Utomo, S. "Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja." *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 2022.
- Haroon Bhorat, Ravi Kanbur, and Natasha Mayet. "The Impact of Sectoral Minimum Wage Laws on Employment, Wages, and Hours of Work in South Africa." *IZA Journal of Labor and Development*, 2(1), 2013.

- Hetiyasari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2022.
- Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan". *Jurnal Yuridis*, 3(2): 4, 2016.
- Joka, M. R. "Implikasi pandemi covid-19 terhadap pemenuhan hak hukum pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha". *Binamulia Hukum*, 9(1), 1-12, 2020.
- Kahfi, A. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72, 2016
- Kirti, H. N. "Mendapat Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)." *Notarius*, 11(1), 2018.
- Kusumawati, M. P. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang "Dirumahkan" Akibat Pandemi Covid-19". *Literasi Hukum*, 5(1), 1-9, 2021
- Lumanaw, T. P. W. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dari Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Lex Privatum*, 9(6), 2021.
- Maswandi, M. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 2017.

- Mohammad Ilyas. “Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ius Constituendum*, 2018.
- Moho, H. “Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan.” *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 2022.
- Nita, S., & Susilo, J. “Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja Dengan Pengusaha.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, 6(1), 2020.
- Nurchahyo, N. “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 2021.
- Prajnaparamitha, Kanyaka, and Mahendra Ridwanul Ghoni. “Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum.” *Administrative Law and Governance Journal* 3.2 (2020): 314-328, 2021.
- Putra, E., & Chrismond, A. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Dicton*, 4(3), 2021
- Reka, M., Rezanti, B. D., & Sulistiyantoro, H. “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pekerja Yang Dirumahkan Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya”. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 2021.
- Riyadi, C. S., & Thalib, M. C. “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi”. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 2020.

- Samudra, A., & Nurhasanah, N. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirumahkan Dan Di-PHK Pada Masa Pandemi Covid-19." *Lex Jurnalica*, 2021.
- Sefryndo, K. E. H. "Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja pada Home Industri (Legal Protection for Workers' Wage Rights in Home Industries)." *Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.
- Shalihah, F. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM." *UIR Law Review*, 1(2), 2017.
- Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2.2, 2019.
- Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Administrative Law and Governance Journal* 3.3, 2020.
- Syahrial, S. "Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia". *Jurnal Ners*, 4(2), 2020.
- Umar, A. "Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pekerja pada Industri Manufaktur di Kota Makassar." *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), 2012.
- Utami, R. K., & Nawi, S. "Hak dan Kewajiban Pekerja Bagi Karyawan Yang Dirumahkan Akibat Dari Pandemi Covid-19". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 2021.

DISERTASI DOKTOR

Prasetyo, D. “Pelanggaran Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Hal Pekerja Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan (Studi Kasus Di Pt. Indoplast Makmur)”. Universitas Airlangga, 2007.

<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11659>

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Riset/ Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\(at\)live.undip.ac.id](mailto:fh(at)live.undip.ac.id)

Nomor : 493/UN7.F1/AK/XI/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

12 NOV 2024

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No.512
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagaimana tercantum dalam kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Najwa Alisah Burhan
NIM : 11000121120036
semester : 7 (tujuh)
mata kuliah : Tugas Akhir (Skripsi)
alamat : Jl. Tembalang Selatan VI No.18
nomor HP : 085327095123

data/informasi : Wawancara kepada Hakim yang mengadili perkara pada
yang diperlukan : Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN
Smg

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. /s/ NIP. 196711191993032002

B. Surat Jawaban Permohonan Riset/ Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Silwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarang.go.id pn.semarangota@gmail.com

Nomor : 33/KPN/SKET.Riset.HK2/III/2025
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerangkan bahwa :

Nama : NAJWA ALISAH BURHAN
NIM : 11000121120036
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro (UNDIP)
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tanggal 14 Maret 2025 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Hak atas Upah bagi Pekerja yang Dirumahkan oleh Pemberi Kerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Maret 2025

